

ALASAN PEREMPUAN MELAKUKAN *VICTIM BLAMING* PADA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL

Aulya Enggarining Restikawasti

Universitas Negeri Surabaya, aulya3424@gmail.com

Warsono

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi perempuan Ex-Lokalisasi Dolly dalam menyikapi tindak pelecehan seksual dan kebiasaan *victim blaming* yang dilakukan oleh masyarakat Dolly. Jenis penelitian ini adalah kualitatif eksploratif dengan menggunakan desain studi kasus. *Victim Blaming* merupakan sebuah ideologi tentang peneguhan terhadap ketidakadilan dengan menemukan celah kesalahan pada korban ketidakadilan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sikap masyarakat khususnya perempuan Ex-Lokalisasi Dolly terhadap korban pelecehan seksual masih sangat disayangkan. Penormalisasian pelecehan seksual dan didukung sifat permissive atau tak acuh terhadap lingkungan sekitar, yang membuat mereka bersikap tidak adil serta menyalahkan perempuan korban pelecehan seksual bahwa mereka adalah penyebab terjadinya tindak pelecehan seksual. Sebagian besar masyarakat khususnya perempuan tidak memiliki kesadaran dan edukasi yang cukup mengenai pelecehan seksual. Mayoritas perempuan Dolly dengan jenjang pendidikan rendah melakukan *blaming the victim* terhadap korban pelecehan seksual.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Wanita, *Victim Blaming*.

Abstract

This study aims to determine the perception of Dolly Ex-Localization women in responding to acts of sexual harassment and victim blaming habits practiced by the Dolly community. This type of research is exploratory qualitative using a case study design. Victim Blaming is an ideology about affirming injustice by finding faults in the victims of injustice. The results of this study indicate that the attitude of the community, especially Ex-Lokalissi Dolly women towards victims of sexual harassment is still very unfortunate. Normalization of sexual harassment and supported by the permissive nature of the surrounding environment, which makes them behave unfairly to victims of sexual harassment and blaming women victims of sexual harassment that they are the cause of sexual harassment. Most people, especially women, do not have enough awareness and education about sexual harassment. The majority of Dolly women with low levels of education are blaming the victim to victims of sexual harassment.

Keywords: Sexual Harassment, Woman, Victim Blaming.

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual terjadi pada satu dari tiga wanita di dunia dan pada satu dari enam pria di dunia, dan masalah ini sering kali dinormlisasikan oleh masyarakat (Komnas Perempuan, 2018). Dewasa ini, perempuan masih belum mendapatkan kebebasan dalam menyuarkan masalahnya, memberikan pendapat maupun melakukan pembelaan atas hal yang ditujukan kepada mereka. Selain dibungkam oleh masyarakat, beberapa diantaranya bahkan dituduh ikut menjadi penyebab terjadinya tindak pelecehan seksual.

Pelecehan seksual sendiri merupakan segala bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh korbannya. Bentuk pelecehan seksual dapat berupa lisan atau ucapan, tulisan, isyarat dan tindakan fisik yang berkonotasi seksual.

Segala kegiatan yang berkonotasi seksual dapat dianggap sebagai pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur seperti adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian dilakukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan oleh korban, dan mengakibatkan penderitaan serta depresi pada korban. (Winarsunu, 2008)

Dalam studi yang dilakukan oleh Helen Benedict pada tahun 1992 tentang laporan kejahatan seksual, menunjukkan bahwa perempuan memang sering disalahkan atas tindakan mereka yang dianggap menarik perhatian pria, meskipun demikian Benedict mengungkapkan bahwa tidak semua perlakuan terhadap korban kejahatan seksual direpresentasikan dengan cara yang sama (Helen Benedict dalam Byerly and Karen Ross, 2006:43)

Para korban pelecehan seksual mayoritas adalah perempuan; baik dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Di Indonesia sendiri perempuan menjadi objek yang rawan untuk mendapatkan pelecehan seksual. Setelah mendapat pelecehan seksual biasanya korban akan tutup mulut, mengurung diri, dan tidak mau menceritakan kepada orang lain tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Banyak faktor yang mendasari dan mengakibatkan para korban pelecehan seksual sulit untuk menerima dan mengenali tindakan pelecehan seksual. Para korban cenderung merasa bingung menggambarkan pada diri mereka tentang apa yang telah terjadi. Di sisi lain, masyarakat juga menghakimi korban dan memposisikan korban menjadi yang paling bersalah.

Pelecehan seksual tidak mengenal tempat dan waktu, bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Pada umumnya pelecehan seksual atau kekerasan seksual dilakukan oleh orang-orang yang sudah dikenal oleh korban seperti teman, rekan kerja, saudara bahkan ayah (andung/tiri). Sebagian kecil kasus lain pelecehan seksual dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal korban. Menurut CATAHU tahun 2018 Komnas Perlindungan perempuan, di ranah *privat* atau personal yang dilakukan oleh orang terdekat korban (*incest*) adalah sebesar 2.979 kasus. Sedangkan di ranah publik dimana pelaku dan korban tidak memiliki hubungan darah dan kekerabatan maupun perkawinan, pelecehan seksual mencapai angka 2.670 kasus yang meliputi kasus pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual lain.

Terdapat beberapa faktor yang mendasari isu pelecehan seksual yang terjadi dinormalisasikan oleh mayoritas masyarakat. Maraknya *rape culture*, kurangnya edukasi menyeluruh tentang *sexual behaviour* atau kebiasaan seksual serta *sexual violence* atau kekerasan seksual. *Rape culture* merupakan sebuah kondisi dimana pemerkosaan dianggap lazim terjadi dan kekerasan seksual dianggap normal. Beberapa hal yang termasuk dalam *rape culture* yakni, menyalahkan korban pelecehan seksual dengan cara mengomentari pakaian korban, kondisi kejiwaan korban, dan juga kelakuan korban; meremehkan pelecehan seksual; mentoleransi pelecehan seksual; mendefinisikan 'laki-laki' sebagai dominasi dan memiliki nafsu yang lebih tinggi daripada perempuan.

Victim blaming salah satu bagian dari *rape culture* saat ini gencar dilakukan oleh mayoritas masyarakat. *Victim blaming* dilakukan dengan menyalahkan korban pelecehan seksual dan menganggap tindakan itu terjadi akibat dari tingkah laku korban. Umumnya masyarakat akan menyalahkan korban dengan cara melabeli dan menuding korban serta beranggapan bahwa korban pelecehan seksual terkesan lebih rendah dan tidak setara.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lily K Thacker, ia mendefinisikan *victim blaming*

sebagai bagian dari budaya pemerkosaan yang lebih besar dan kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai hal biasa; hal ini dikategorikan sebagai praktik gender yang menargetkan perempuan melalui berbagai institusi, yaitu media dan sistem peradilan pidana (Thacker, 2017:3)

Kuatnya budaya patriarki yang dianut mayoritas masyarakat membuat para perempuan tidak bisa bebas mengutarakan pendapat mereka. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sakina dan rekan, mereka mengutarakan bahwa Sistem patriarki yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki memunculkan stigma bahwa perempuan selalu salah. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat. Pembatasan peran perempuan oleh budaya patriarki menjadikan perempuan terbelenggu dan mendapatkan perlakuan diskriminasi (Sakina & Siti, 2007).

Kurangnya edukasi yang menyeluruh mengenai *sexual behaviour* atau kebiasaan seksual dan *sexual violence* atau kekerasan seksual juga menjadi faktor penormalisasian masalah pelecehan seksual. Pendidikan seks pada anak usia dini dapat mengurangi potensi pelecehan seksual. Anak dapat diberi pengetahuan mengenai anggota tubuh mereka, termasuk pengetahuan apa saja yang tidak boleh dilakukan orang lain terhadap anggota tubuh yang sensitif bagi mereka. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mempertimbangkan untuk memasukkan pendidikan seks sejak dini di sekolah.

Ada sejumlah alasan mengapa orang memilih untuk menyalahkan korban atas kejahatan yang terjadi pada mereka. Alasan-alasan ini berasal dari kesalahpahaman tentang korban, pelaku, dan sifat tindakan kekerasan. Para korban kadang-kadang secara keliru digambarkan sebagai individu pasif yang mencari dan tunduk pada kekerasan yang mereka alami. Pelanggar dipandang sebagai individu yang malang yang dipaksa untuk bertindak dengan kekerasan oleh kekuatan yang tidak dapat mereka kendalikan. Alasan paling populer untuk menyalahkan korban antara lain kepercayaan pada dunia yang adil, kesalahan atribusi, dan sistem patriarki yang masih sangat kental melekat pada masyarakat (The Canadian Resource Centre for Victims of Crime, 2009).

Indonesia tidak lepas dari masalah pelecehan seksual ini, mengingat tingginya kasus pelecehan seksual pada wanita bahkan anak-anak. Kasus pelecehan baru-baru ini terjadi pada salah satu mahasiswi universitas ternama di Indonesia pada saat melaksanakan kegiatan KKN, kasus Baiq Nuril yang mendapatkan pelecehan seksual dari atasannya. Kejadian tersebut merupakan segelintir kasus dimana korbannya mengalami *victim blaming* yang

dilakukan tidak hanya oleh masyarakat tetapi juga instansi pemerintahan yang menganggap kasus tersebut merupakan hal yang sudah biasa terjadi dan pada akhirnya korban tidak mendapatkan keadilan atas apa yang mereka alami.

Gang Dolly merupakan suatu kawasan Ex-Lokalisasi yang terletak di daerah Surabaya. Gang Dolly yang sekarang menjelma seperti kawasan perkampungan pada umumnya dulu kita kenal dengan salah satu kawasan lokalisasi terbesar se Asia Tenggara menyimpan cerita-cerita kelam dibaliknya. Kawasan ini didirikan sekaligus dikelola oleh tante Dolly, seorang perempuan keturunan Belanda ketika Belanda menginvasi Kota Surabaya. Laporan terakhir terdapat sekitar dua ratus delapan puluh empat puluh delapan wisma prostitusi dengan lebih dari seribu orang PSK. Faktanya gang Dolly ini memberi kehidupan bagi warga sekitar dan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia.

Meskipun sekarang Gang Dolly telah menjadi kawasan Ex-Lokalisasi dan menjelma menjadi kampung wisata, namun kasus pelecehan masih sering terjadi. Beberapa kejadian pelecehan seksual menimpa para perempuan serta anak-anak di kawasan ini. Hal yang sangat disayangkan adalah ketidakpedulian mereka akan kejadian pelecehan seksual tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Tjukup selaku ketua RW 03 juga menuturkan bahwa:

“...Masih ada mbak walaupun nggak sesering dulu ya. Tapi tetap masih ada, apalagi dijalan besar itu itu kan rame penuh orang kalau pagi siang gitu dari berbagai golongan, nah disitu biasanya lebih sering mbak...”(Data Primer: Sabtu, 11 Mei 2019)

Gang Dolly merupakan kawasan mantan daerah prostitusi sehingga hal-hal berbau seksual menjadi sesuatu yang lumrah bagi mereka. Masyarakat mengaku sering melihat pelecehan seksual tetapi tidak seorang pun yang membantu dan memberikan pertolongan atau perlindungan pada korban. Masyarakat terlalu acuh akan keadaan dan menormalisasi kejadian pelecehan tersebut. Peristiwa seperti ini bukan hanya terjadi sekali atau dua kali saja, namun sudah seperti suatu kebiasaan yang memang sudah biasa terjadi.

Upaya pencegahan tindakan pelecehan seksual kerap dilakukan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa tindakan pelecehan akan terus terjadi. Langkah penting untuk mencegah pelecehan seksual berawal dari diri sendiri. Kesadaran diri akan pelecehan seksual perlu dimengerti dan dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat. Laki-laki pun juga perlu menyadari akan hal ini. Pelecehan seksual yang merupakan suatu hal tabu dan sangat tidak bermoral di tempat umum yang serba terbuka tersebut bisa terjadi dengan bebas tanpa ada perlawanan dari masyarakat sekitar serta bagaimana persepsi

masyarakat khususnya perempuan terhadap ideologi *victim blaming*.

Menanggapi ideologi *victim blaming* yang perlahan-lahan telah masuk dan menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat, peran masyarakat dan generasi muda yang lebih tahu dan mampu untuk mengentaskan masyarakat dari pengaruh *victim blaming* dan tidak menjadikannya budaya dimasa depan. Membentuk kebudayaan yang lebih beradab dengan menghapus adanya *victim blaming*, dan melakukan perubahan yang berarti bagi korban agar korban pelecehan seksual dapat bangkit dari keterpurukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana perspektif perempuan Ex-Lokalisasi Dolly tentang ideologi *victim blaming* terhadap korban pelecehan seksual, serta untuk mengetahui bagaimana *victim blaming* memudahkan rasa kemanusiaan masyarakat terhadap korban pelecehan seksual.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif eksploratif dengan studi kasus. Data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar-gambar dianalisis secara deskriptif. Adapun argumentasi peneliti menggunakan studi kasus *pertama*, ideologi *victim blaming* yang selama ini diterapkan masyarakat terhadap korban pelecehan seksual tanpa mereka sadari telah membuat kasus pelecehan seksual menjadi semakin banyak terjadi. *Kedua*, dengan banyaknya kasus pelecehan seksual yang menimpa perempuan peneliti ingin mengkaji apakah peran masyarakat sangat dibutuhkan bagi korban pelecehan seksual untuk mendapatkan keadilan dan kenyamanan diri, serta tanggapan masyarakat mengenai ideologi *victim blaming* yang perlahan memudahkan rasa kemanusiaan masyarakat. *Ketiga*, kasus *victim blaming* ini menjadi penting untuk diteliti karena menyangkut perubahan karakter sebagai bangsa beradab yang berpedoman pada Pancasila, namun pelakuan masyarakat justru bertolak belakang dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah persepsi perempuan di Ex-Lokalisasi Dolly tentang budaya *victim blaming* terhadap korban pelecehan seksual. Persepsi perempuan yang dimaksud di sini merupakan tanggapan perempuan terhadap ideologi *victim blaming* atau menyalahkan korban pelecehan seksual, bagaimana masyarakat khususnya perempuan menilainya dari sudut pandang nilai-nilai karakter hidup sebagai makhluk sosial dan ditinjau dari sisi psikologis masyarakat.

Fokus penelitian adalah bagaimana masyarakat memperlakukan korban pelecehan seksual. Selain itu juga terkait dengan bagaimana dampak ideologi *victim blaming* terhadap perubahan karakter masyarakat. Munculnya ideologi *victim blaming* menjadi salah satu indikator

bahwa terdapat perubahan karakter dalam diri masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia yang berpedoman pada ideologi bangsa yakni Pancasila, perubahan karakter yang disebabkan oleh ideologi *victim blaming* ini sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu informan dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Informan adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui dan atau terlibat langsung dengan fokus permasalahan sehingga dapat memperoleh informasi dan kondisi yang penting dalam fokus penelitian (Moleong, 2014:90). Adapun kriteria informan dalam penelitian ini yang pertama, orang yang mengetahui dan memahami kondisi wilayah di daerah Ex-Lokalisasi Dolly Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan yaitu Bapak Radityaka Wahyu Iswara selaku Sekretaris Desa, Bapak Tjukup selaku ketua RW 03 Putat Jaya dan Bapak Bambang Suhardi selaku ketua RW 06 Putat Jaya. Kedua yaitu perempuan yang tinggal di Ex-Lokalisasi Dolly yang mengerti dan pernah mengetahui tindak pelecehan seksual.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis dari Miles dan Hubberman. Untuk menguji keabsahan data digunakan metode triangulasi sumber dengan membandingkan dan meneliti kembali derajat kepercayaan informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak tahun 2014 lokalisasi Dolly telah resmi ditutup oleh pemerintah Kota Surabaya yang dipimpin oleh Dr. Ir. Tri Rismaharini, M.T selaku Walikota Surabaya. Banyak pro dan kontra mengiringi penutupan lokalisasi Dolly, beberapa pihak yang menolak penutupan lokalisasi ini melakukan demo besar-besaran pada saat itu. Hal ini terjadi karena lokalisasi Dolly bukan hanya sumber pekerjaan dan rezeki bagi para PSK, melainkan bagi banyak pihak disekitar lokalisasi seperti pemilik warung, keamanan, tukang parkir, tukang becak dan lain sebagainya. Peneliti mengadakan observasi tentang kondisi dalam lingkungan tersebut. Beberapa kali peneliti mengunjungi kawasan Ex-Lokalisasi Dolly sekaligus menemui pejabat setempat untuk menanyakan kondisi lingkungan di kawasan Dolly. Bapak Wahyu Iswara selaku Sekretaris Desa Putat Jaya menyampaikan bahwa:

“...Di Kelurahan Putat Jaya ini ada 5 RW yang masuk dalam kompleks lokalisasi Dolly-Jarak, yaitu RW 3, RW 6, RW 10, RW 11 dan RW 12...”
 “...Dari laporan yang masuk di kelurahan ada sekitar 1.449 PSK yang di data sampai Dolly resmi

ditutup dan mendapatkan kompensasi dari pemerintah kota surabaya. Dulunya sebelum Dolly ditutup kurang lebih ada 5000 PSK yang bekerja di lokalisasi Dolly-Jarak ini...” (Data primer: Jumat, 10 Mei 2019)

Tabel 1. Data Lokalisasi Dolly dan Jarak

Data Lokalisasi Dolly & Jarak							
RW	PSK Update 2014	Mucikari	Wisma				RT
			2011	2012	2013	2014	
III	335	41	81	76	69	69	3, 4, 5, 6, 11
VI	104	16	23	21	21	21	6
X	172	49	74	72	70	70	1, 2, 3, 4
XI	340	91	126	120	104	104	1, 2, 3, 4
XII	498	11	24	23	22	20	4, 5, 6
Jml	1.449	208	328	312	286	284	17

Berdasarkan keterangan dari bapak Radityaka Wahyu Iswara selaku sekretaris kelurahan Putat Jaya. Selain itu beliau juga menjelaskan mengenai tingkat pelecehan seksual yang terjadi di sekitar Ex-Lokalisasi Dolly-Jarak.

“...Saya rasa sih tetap ada ya mbak, masalahnya kan itu tempat bekas prostitusi mau nggak mau meskipun sudah ditutup ya pasti masih kental dengan hal-hal seksual seperti itu...” (Data Primer : Jumat, 10 Mei 2019)

Senada dengan Bapak Radityaka, Bapak Bambang selaku ketua RW 06 juga menuturkan bahwa:

“...Ada tapi nggak banyak mbak, anak-anak punk gitu biasanya. Laki perempuan ngerombol jadi satu nggak tau ngapain, tapi yang laki-laki itu sering goda-goda orang lewat...” (Data primer: Selasa, 14 Mei 2019)

Berdasarkan data di atas dapat dilakukan analisis bahwasanya tindak pelecehan seksual di daerah Ex-Lokalisasi Dolly masih terjadi namun tidak sesering saat bisnis prostitusi di daerah Dolly masih berjalan. Tindak pelecehan yang terjadi di Dolly ini juga didukung dengan *image* Dolly yang sudah buruk dimata masyarakat. Pelaku tak segan jika ingin melakukan aksi pelecehan di daerah Dolly karena dianggap sudah biasa.

Tidak Adanya Sikap Simpati dan Empati

Masyarakat sekitar Ex-Lokalisasi Dolly khususnya perempuan, dalam menyikapi sebuah kejadian yang menyangkut seksualitas sedikit berbeda dengan perempuan lain yang tinggal di daerah non lokalisasi. Di

daerah Ex-Lokalisasi mereka menganggap segala sesuatu yang berhubungan dengan seks bukan lagi hal yang tabu. Masyarakat sudah sangat terbiasa dengan hal-hal yang berbau seks yang mengakibatkan kurangnya rasa simpati dan empati antar masyarakat dan antar perempuan, khususnya dengan orang-orang yang mengalami tindak pelecehan seksual. Hal ini diperkuat dengan pengakuan Ibu sumiyati bahwasanya:

“...Wong kene iku wes biasa mbak delok ngno iku, wes ga melu urusan lah pokok e. Urusan e dewe-dewe mbak...”

“...Orang sini itu sudah terbiasa mbak lihat yang kayak gitu, sudah tidak mau ikut urusan. Masalahnya sendiri-sendiri mbak...” (Data primer: Minggu, 12 Mei 2019)

“...Ga gelem melu-melu urusan e wong liyo iku, oleh opo yoan nek melu-melu iku. Pokok e dijarno, arep sampe meteng yo ben dirabi ngno...”

“...Nggak mau ikut-ikutan urusan orang lain, dapet apa kalau ikut-ikutan urusan orang. Pokoknya dibiarkan saja, mau sampai hamil ya biar di nikahin gitu...” (Data primer: Minggu, 12 Mei 2019)

Senada dengan Sumiyati, ketika ditanya tentang sikapnya terhadap korban pelecehan seksual Supiati juga menuturkan bahwa:

“...Apa ya mbak, ga ada mbak. Paling ya cuma bisa nasihat sama ya basa-basi prihatin gitu, wong yang digituin aja sekarang sudah biasa-biasa aja mbak kayak ga terjadi apa-apa gitu...” (Data primer: Minggu, 12 Mei 2019)

“...Masyarakat sini itu cuek lo mbak, mau ada apa juga terserah *wes urusanmu lah intine* (pokoknya itu urusan kamu), kalau nggak di istilahnya *diobrak-obrak* (diajak) gitu ya nggak jalan. Karena mereka mungkin sudah kebiasaan dari dulu waktu Dolly masih belum ditutup lingkungannya seperti itu, jadi respon masyarakat itu ya biasa-biasa saja mbak...” (Data primer: Minggu, 12 Mei 2019)

Masyarakat perempuan Ex-Lokalisasi Dolly kurang memiliki rasa simpati dan empati terhadap korban pelecehan seksual. Kaum perempuan pun tak cukup berempati pada korban pelecehan seksual. Sikap tak berempati ini bisa ditunjukkan dengan sinisme, tidak mempercayai, tidak mau memberikan dukungan, bahkan pada tingkat yang lebih parah lagi adalah menjadikan korban sebagai candaan dan bahan tertawaan.

Kurangnya rasa simpati dan empati dikarenakan masyarakat tidak memiliki kepekaan sosial serta minimnya rasa tanggung jawab sehingga cenderung menghiraukan konsekuensi serta akibatnya. Respon masyarakat yang tidak positif ini, membuat banyak korban dan masyarakat diam walaupun mengetahui atau mengalami sebuah kasus pelecehan seksual. Banyak sekali kasus pelecehan seksual yang terjadi, dan para

korban hidup dalam diam sedangkan pelaku hidup bebas karena tidak adanya laporan yang dibuat.

Sikap Permissive Terhadap Perempuan Korban Pelecehan

Ex-Lokalisasi Dolly menyatu dengan lingkungan keluarga setempat. Masyarakat di sekitar lokalisasi banyak diuntungkan dengan adanya praktek lokalisasi tersebut, misalnya warga setempat bisa mencari nafkah dengan menjadi guide atau bisa berjualan rokok dan perlengkapan prostitusi, parkir sepeda motor dan ada pula yang berjualan nasi. Faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi itu yang mengakibatkan masyarakat sekitar bersikap tidak acuh dengan kegiatan praktek prostitusi tersebut, kegiatan yang sedemikian rupa menjadikan masyarakat disekitar lokalisasi Dolly banyak diuntungkan.

Sikap *permissive* atau tak acuh itu sudah tertanam dalam diri masyarakat Dolly hingga saat ini. Sikap *permissive* yang dilakukan oleh masyarakat dapat menjadi hal negatif karena mengindikasikan bahwa orang tersebut tidak peduli akan keadaan sosial sekitarnya. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Wijayati bahwasanya :

“...Jujur ya mbak, warga di sini itu cuek sekali, mereka nggak mau tahu urusan orang lebih lanjut. Tahu kalau ada kejadian ini paling ya cuma diomongin gitu, karena memang tempat ini kan sudah terbiasa sama bau-bau seks kayak gitu mbak. Jadi ya masa bodoh gitu, yang penting nggak ganggu hidupnya orang lain aja mbak...” (Data primer: Selasa, 14 Mei 2019)

Senada dengan Wijayanti, Sumiyati juga menuturkan bahwa:

“...Nang kene iku seng biasa e nakal terus gudo wong wedok iku duduk asli wong kene mbak, arek-arek jalanan ngno iku lo. Nak asli wong kene iku ga tau ngno iku ga wani daripada gudo wong wedok mending tuku, dadi yo wes di jarno ae ambek wong-wong. Akeh arek-arek mbuh ko endi ngno ngumpul nang bekas-bekas wisma iku, arep ngandani yo wes males wong kene mbak...”

“...Di sini itu yang biasa nakal terus godain perempuan itu bukan asli orang sini mbak, anak-anak jalanan gitu. Kalau asli orang sini ga pernah kayak gitu gaberani, dari pada godain perempuan lebih baik dibeli, jadi ya sudah di biarin aja sama orang-orang. Banyak anak-anak nggak tahu dari mana ngumpul di bekas wisma itu, mau negur ya sudah malas orang sini mbak...” (Data primer: Minggu, 12 Mei 2019)

Sikap masyarakat tidak acuh terhadap korban sebagai dampak dari lingkungan Dolly yang dahulunya menjadi tempat lokalisasi. Menurut informan, hal-hal seperti itu sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan masyarakat yang ada disekitar lokalisasi Dolly. Perilaku tersebut menjadikan suasana dalam lingkungan lokalisasi serasa

tidak berada dalam lingkungan yang pada umumnya. Tata letak rumah warga yang menyatu dengan lokalisasi Dolly menciptakan perbedaan yang signifikan dari kehidupan masyarakat pada umumnya. Hal itu tampak dari perilaku keseharian masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari.

Perilaku masyarakat Dolly memang sedikit berbeda dengan masyarakat pada umumnya, bahkan perempuan Dolly pun terlihat lebih bebas dalam menjalankan kehidupan mereka seperti dalam hal berpakaian, bergaul maupun sikap dan tingkah laku. Mereka sering mendengarkan pembicaraan yang cenderung melecehkan atau merendahkan perempuan (PSK), akhirnya berubah menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakat hingga sekarang. Bersikap lapang dada dan tak acuh atas tindakan-tindakan para pelaku pelecehan menjadi suatu pilihan yang tepat bagi mereka.

Menganggap Rendah Korban Pelecehan Seksual

Perilaku masyarakat yang menganggap rendah korban pelecehan seksual merupakan wujud dari ideologi *victim blaming*. Blaming the victim sebagai ideologi digunakan untuk membenarkan rasisme dan ketidakadilan sosial dengan menemukan celah kesalahan pada korban. Dewasa ini masyarakat Indonesia sering melakukan *slut-shaming* (salah satu dari penyebab munculnya *victim blaming*) yaitu memberikan opini pada orang lain, terutama perempuan, berdasarkan dari penampilan dan perilaku mereka yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. *Slut-shaming* menekan sisi psikologis orang untuk selalu memberikan opini dan asumsi-asumsi terhadap suatu peristiwa, yang ditujukan pada sang korban. Dalam hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Supiati:

“...Masalahnya tergantung perempuannya kalau dia ga mau ga akan terjadi kalau dia tegas ya ga terjadi, kalau perempuannya *begejekan* ya emang harus diberitahu mbak biar dia sadar biar ga terjadi lagi. Jadi ya tergantung perempuannya...” (Data primer: Minggu, 12 Mei 2019)

Berdasarkan dengan apa yang disampaikan Supiati selaku informan menyatakan bahwa pelecehan seksual bisa terjadi karena perempuan atau korban juga menghendaki tindakan tersebut. Jika ia tidak menghendaki maka pelecehan tidak akan terjadi. Penjelasan yang disampaikan oleh informan merupakan salah satu bentuk merendahkan korban pelecehan seksual. Senada dengan Supiati, Sumiati juga menuturkan hal yang sama yang merendahkan korban pelecehan seksual:

“...Yo iku seh mbak, seng akeh yo goro-goro klambine wong edok-edok iku seng kurang bahan menggoda iman...”

“...Ya itu sih mbak, yang banyak (pelecehan seksual) itu gara-gara bajunya perempuan itu yang

kurang bahan dan menggoda iman...” (Data primer: Minggu, 12 Mei 2019)

Berdasarkan apa yang disampaikan Sumiati menunjukkan bahwa akibat perempuan yang memakai pakaian kurang bahan (mini) menurutnya hal itu dapat menggoda iman para laki-laki yang melihatnya yang pada akhirnya terjadilah pelecehan seksual. Pendapat informan mengenai pakaian mini perempuan yang menggoda iman termasuk wujud dari merendahkan korban sekaligus menyalahkan. Hal ini terjadi karena sistem patriarki yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Laki-laki selalu dianggap membutuhkan seksualitas, dan perempuan tidak. Akhirnya, perempuan cenderung dianggap sebagai pemuas kebutuhan seksualitas laki-laki, tetapi tidak sebaliknya.

Menyalahkan Korban Pelecehan Seksual

Akibat yang sering timbul dari masyarakat tentang pelecehan seksual yang dialami seseorang adalah munculnya berbagai hinaan yang ditujukan kepada korban. Masyarakat cenderung menyalahkan korban pelecehan seksual (*blaming the victim*). Kurangnya edukasi yang menyeluruh mengenai *sexual behaviour* (kebiasaan seksual) dan *sexual violence* (kekerasan seksual) juga menjadi faktor ketidakpedulian dan salah persepsi masyarakat terhadap masalah pelecehan seksual. Untuk itu peneliti mengambil data dari informan dengan berbagai jenjang pendidikan, karena dalam menyikapi *victim blaming* informan dengan jenjang pendidikan rendah dan tinggi mempunyai perbedaan pendapat yang cukup signifikan. Berikut pendapat informan yang mempunyai tingkat pendidikan rendah mengenai *victim blaming*, Sumiyati (SD) menuturkan bahwa:

“...Arek wedok-wedok yo kudune iso jogo awak, gawe klambi seng pantes ben wong lanang nek ngingeti ga nafsu. Nek moleh iku yo ojo bengi-bengi, kan yo ga apik ya mbak wong wedok iku moleh bengi, nek memang moleh bengi yo nek iso karo koncone. Yo iku seh mbak, seng akeh yo goro-goro klambine wong edok-edok iku seng kurang bahan menggoda iman...”

“...perempuan ya harus bisa jaga diri, pakai baju yang pantas agar laki-laki kalau melihat tidak nafsu. Kalau pulang itu ya jangan malam-malam, kan juga tidak baik ya mbak perempuan itu pulang malam, kalau memang pulang malam ya kalau bisa sama temennya. Ya itu sih mbak, yang banyak ya gara-gara bajunya perempuan itu yang mini dan menggoda iman...”

“...nek emang patut disalahno lo terus katene pie, yo ben sadar nek salah perlu enek seng dibenerno soko awake dewe kan, pelaku ne yo ngno yo kudu disalahno. Tapi kan nek ga enek seng ngawiti yo ga bakal enek kejadian to mbak. Yo pokok e kui podo-podo salah e ngno. Pie yo mbak ngesakne tapi yo salah...”

“...kalau memang patut disalahkan terus mau bagaimana ? biar sadar juga kalau salah dan harus ada yang di benerin dari dirinya sendiri, pelakunya ya juga salah. tapi kan kalau tidak ada yang memulai ya tidak akan ada kejadian mbak. Ya semua salah. gimana ya mbak, kasihan tapi ya salah...” (Data primer: Minggu, 12 Mei 2019)

Senada dengan Sumiyati, Supiati (SMP) juga menuturkan bahwa:

“...Kalau dari perempuannya sih usia-usia dini yang masih kecil-kecil sekarang ini sudah nggak sama kayak anak perempuan dulu lo mbak, sudah berani-berani pakaiannya juga sudah minim-minim...”

“...Tergantung ya mbak, ya kayak tadi lihat-lihat dulu perempuannya mbak. Kalau dia perempuan baik-baik kalau disalahkan ya kurang setuju, kalau dia nakal ya memang harus disalahkan biar sadar ya mbak...” (Data primer: Minggu, 12 Mei 2019)

Senada dengan Supiati, Marni (SMP) juga menuturkan bahwa:

“...Dari perempuannya juga mungkin perilakunya , pakainya harusnya lebih sopan terus kalau semisal pulang malam itu sebisa mungkin jangan sendiri minta dianter atau bareng sama temen...” (Data primer: Minggu, 12 Mei 2019)

Berdasarkan data di atas dapat dianalisis bahwa masyarakat dengan pendidikan rendah cenderung melakukan *victim blaming* terhadap korban pelecehan seksual. Bahkan sebagai sesama perempuan yang seharusnya bisa merasakan perasaan korban pelecehan seksual, mereka tetap menyalahkan korban. Sifat mempertahankan dan melestarikan tradisi lama atau konservatif yang dimiliki oleh berbagai pihak serta adanya penguat dari kebudayaan di lingkungan sebagai benih yang dapat mengembagkan ideologi *victim blaming*. Secara tidak langsung hal ini merupakan konsep sikap yang memaklumi atau menormalisasi pelaku tindak pelecehan seksual dan memperkuat perbedaan kekuatan dan kekuasaan antar jenis kelamin wanita dan pria.

Dewasa ini *sex education* sangat diperlukan oleh masyarakat, bukan hanya semata-mata diperuntukan bagi anak-anak usia dini maupun remaja, wanita dewasa dan para orang tua juga harus mendapatkan *sex education* terutama mengenai *sexual behaviour* (kebiasaan seksual) dan *sexual violence* (kekerasan seksual). Apa yang dilakukan masyarakat ini sesuai dengan *Muted Group Theory* atau teori kelompok bungkam yang diusung oleh Edwin dan Stinley Ardener seorang antropolog Oxford University, menuturkan bahwa kelompok dengan kekuasaan yang lebih rendah seperti perempuan, kaum proletar, dan orang kulit hitam, harus belajar untuk bekerja dalam sistem komunikasi yang telah dikembangkan oleh kelompok dominan.

Terdapat 3 asumsi yang di paparkan di dalam teori kelompok bungkam ini, meliputi: (1) perempuan

mengartikan dunia secara berbeda dengan laki-laki karena pengalaman hidup pria dan perempuan yang berbeda; (2) adanya perbedaan dalam pembagian kerja; (3) dominasi politik antara laki-laki dengan perempuan berbeda. System persepsi laki-laki yang lebih dominan menghambat ekspresi bebas perempuan mengenai dunia, agar dapat berkontribusi di masyarakat perempuan harus merubah pemikirannya sesuai dengan sistem ekspresi laki-laki yang diterima.

Berdasarkan tiga asumsi di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih memegang kuat sistem patriarki yang sudah menjadi kebudayaan dan mendarah daging dalam diri masyarakat. Mereka yang memiliki pola pikir yang masih kuno dan tingkat pendidikan yang rendah masih memegang kuat sistem patriarki ini. Masyarakat menganggap perempuan tidak mempunyai kuasa atas dirinya dan lemah, mengartikan ‘laki-laki’ sebagai dominasi dan memiliki nafsu lebih tinggi (*sexually aggressive*) dan mengartikan ‘wanita’ sebagai penurut dan tidak lebih agresif secara seksual. Mereka mengajarkan wanita supaya tidak dilecehkan namun lupa untuk mengajarkan para laki-laki untuk tidak melecehkan.

Berbeda dengan yang memiliki tingkat pendidikan rendah, informan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi menanggapi ideologi *victim blaming* dengan lebih bijaksana. Mereka tidak menyudutkan perempuan melainkan lebih melihat dari berbagai aspek dan faktor yang menyebabkan pelecehan seksual itu bisa terjadi. Niki (S1) menuturkan bahwa :

“...Biasanya korban ya mbak yang disalahkan, tapi juga nggak selamanya korban selalu salah. saya juga pernah lihat wanita berhijab pun masih dilecehkan padahal kan pakaiannya juga ga ketat, tertutup juga. Jadi ya ga bisa korban disalahkan begitu aja...”

“...Seharusnya bukan wewenang masyarakat ya untuk mengadili korban pelecehan seksual, pemerintah kita sendiri pun kurang perhatian, kurang memberikan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat tentang pelecehan seksual ini. Seharusnya juga ada perlindungan hukum bagi pelaku dan korban pelecehan seksual, perlindungan hukum ini bisa ditegakkan lagi oleh pemerintah...” (Data primer: Jum’at, 17 Mei 2019)

Senada dengan Niki, Putri (S1) juga menuturkan bahwa:

“...Sangat disayangkan sekali karena kita sebagai perempuan itu pasti serba salah, pikiran laki-laki itu tidak bisa kami para perempuan kendalikan. Imajinasi laki-laki itu berbeda-beda dalam pelecehan seksual...”

“...Kalau bisa ya jangan lah, karena korban juga sudah mendapatkan beban dan tekanan sebagai ‘korban’ itu sendiri. Jangan pernah *judge* apapun meskipun dia menggunakan pakaian seperti apapun...”

“...Menurut saya hal seperti itu tidak layak diterima oleh korban pelecehan seksual, yang pantas di dapatkan korban itu ya support, rasa mereka diterima masyarakat, dan tidak mengungkit atau membahas apapun mengenai yang mereka alami...”

“...Pembenaran menurut pemikiran mereka sendiri itu faktor utama menurut saya sih mbak. Ini juga berkaitan tentang pendidikan masing-masing individu, jadi mereka masyarakat punya kriteria benar menurut pandangan mereka. Padahal seharusnya korban pelecehan seksual harus didampingi dan dikuatkan tidak malah disalahkan...” (Data primer: Sabtu, 19 Mei 2019)

Berdasarkan data di atas dapat dianalisis bahwa informan dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki pola pikir yang berbeda dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah dalam memandang masalah *victim blaming* terhadap korban pelecehan seksual. Mereka mempunyai perbedaan dalam memposisikan perempuan sebagai korban pelecehan seksual. Informan dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memandang korban pelecehan seksual sebagai yang paling bersalah atas apa yang dialaminya, sebaliknya informan dengan tingkat pendidikan tinggi memandang perempuan sebagai korban pelecehan seksual harus dilindungi dan diberikan dukungan penuh atas ketidakadilan yang korban alami.

Normalisasi Tindakan Pelecehan Seksual

Pandangan terhadap suatu peristiwa tidaklah sama antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Terlebih peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa yang tidak merugikan bagi kepentingan individu sendiri, seperti pelecehan seksual. Kebanyakan masyarakat akan memandang sebelah mata jika dihadapkan dengan peristiwa seperti ini. Ada yang menganggapnya sebuah peristiwa biasa (normalisasi) dan ada pula yang menganggapnya sebagai peristiwa yang tidak biasa (anormalisasi).

Bagaimana sebuah peristiwa dianggap sebagai peristiwa biasa dan tidak biasa adalah tergantung dari lingkungan dan sudut pandang masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di daerah Ex-Lokalisasi Dolly, masyarakat Dolly yang sudah lama berkecimpung dalam dunia ‘seks’ menganggap bahwa peristiwa pelecehan seksual adalah peristiwa yang biasa. Sesuai dengan data yang diperoleh dari beberapa informan yang mempertegas bahwa pelecehan seksual dianggap sebuah peristiwa yang biasa terjadi di daerah Ex-Lokalisasi Dolly. Hal itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Marni, ia menuturkan bahwa:

“...Masyarakat sini itu biasa lo mbak, mau ada apa juga terserah. Karena mereka mungkin udah kebiasaan ya dari dulu kan lingkungannya seperti itu,

jadi respon masyarakat itu ya biasa-biasa saja mbak...”

“...Kalo pelecehan seperti manggil-manggil terus godain gitu biasa di sini mbak. Anak-anaknya ya seperti itu...” (Data primer: Minggu, 12 Mei 2019)

Senada dengan Marni, Supiati juga menuturkan bahwa: “...Di sini itu ya mbak kayak Texas, bebas pokoknya. Pergaulannya bebas, mau pulang malam ya terserah, mau pergi sama siapa ya terserah, mau ngapain ya terserah...”

“...Kalau dulu kan memang dulu sini itu lokasi ya mbak. Orang-orang yang nakal gitu kalau mau cari ya di sini ya mbak, kalau nyari ya pasti dipanggil-panggil di suit-suit in gitu...” (Data primer: Minggu, 12 Mei 2019)

Mayoritas informan yang diwawancarai menyampaikan hal yang sama bahwa mereka menganggap pemerkosaan, pelecehan seksual adalah suatu hal biasa dalam kehidupan sehari-hari. Masalah seksual bukan lagi hal yang tabu bagi masyarakat Ex-Lokalisasi Dolly, terlebih untuk perempuan yang tinggal di daerah tersebut. Mereka tidak sungkan untuk membahas hal-hal yang berbau seksual kepada lawan bicaranya yang sesama perempuan maupun laki-laki. Seksualitas, dan keintiman merupakan makanan sehari-hari yang di dengar dan dilihat oleh masyarakat Ex-Lokalisasi Dolly sehingga hal itu sangatlah wajar bagi mereka. Wijayati juga menuturkan hal yang sama, masyarakat menormalisasi peristiwa pelecehan seksual karena kurang mendapatkan edukasi.

“...Tahu kalau ada kejadian ini paling ya cuma *diomongin* gitu, karena memang tempat ini kan sudah terbiasa sama bau-bau seks kayak gitu mbak. Jadi ya masa bodoh gitu, yang penting nggak ganggu hidupnya orang lain aja mbak...”

“...Masyarakat saya rasa kurang mendapat sosialisasi tentang masalah seksual, pengetahuan mereka tentang seks masih minim ya mbak, bagaimana bahayanya, dampaknya masyarakat kurang paham...” (Data primer: Selasa, 14 Mei 2019)

Normalisasi yang demikian berkaitan erat dengan bagaimana perempuan memahami tubuh mereka. Normalisasi tidak akan terjadi jika perempuan melakukan perlawanan sebagai bentuk reaksi terhadap dirinya atau bisa disebut sebagai ‘pertahanan diri’ perempuan terhadap perbuatan yang tidak diinginkan, dan merendahkan martabatnya sebagai manusia. Perlawanan tersebut dapat meliputi penghindaran, penolakan secara halus menggunakan kata-kata sopan, penolakan secara tegas (misalnya, menepis, menghindar secara langsung), menegur, atau melapor kepada pihak yang berwajib.

Berkaca dari teori kelompok bungkam yang menjelaskan bahwa pria adalah kelompok yang dominan dan pengalaman mereka lebih dipilih dibandingkan pengalaman perempuan. Perempuan dianggap lemah dan

tidak lebih dominan dibandingkan oleh kaum pria yang merupakan kelompok yang dominan di masyarakat, sistem persepsi mereka yang juga dominan. Dominasi ini menghalangi kebebasan ekspresi perempuan, yang mengakibatkan terjadi normalisasi oleh masyarakat karena tidak adanya perlawanan dan pengakuan dari pihak yang bersangkutan.

Perempuan Mengikuti Opini Mayoritas Masyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat sosialisasi merupakan sesuatu yang sangat penting, hal ini membantu seorang individu dalam masyarakat beradaptasi dengan lingkungannya. Masyarakat saling mempengaruhi satu sama lain yang berdampak pada prinsip hidup seseorang, tingkah laku, serta pola pikir. Begitupun dalam menyikapi suatu peristiwa, reaksi dari setiap individu berbeda-beda tergantung dari pola pikir yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Beberapa individu teguh memegang prinsip hidupnya mempunyai pola pikir yang ia bangun sendiri, beberapa individu lain lebih memilih mengikuti lingkungan dan tidak mempunyai prinsip dalam hidup.

Masyarakat Ex-Lokalisasi mempunyai keunikan tersendiri, mereka sangat menjaga kekompakan dalam hidup bermasyarakat tidak terkecuali kekompakan dalam membangun pola pikir dan prinsip hidup mereka. Dengan kata lain mereka hidup mengikuti perkembangan lingkungan dan cenderung tidak memiliki prinsip hidupnya sendiri. Semua bergantung dengan tindakan dan pemikirang orang lain. Salah satu contohnya adalah dalam menyikapi peristiwa pelecehan seksual. Mereka akan bereaksi sama dengan yang mayoritas orang lakukan dalam menyikapi peristiwa pelecehan seksual di Dolly.

Masyarakat Dolly banyak yang melakukan tindakan *victim blaming* terhadap korban pelecehan seksual dengan atau tanpa mereka sadari. ‘Banyak’ yang berarti hampir seluruh masyarakat kompak melakukan hal tersebut. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang menuturkan bahwa hal tersebut dilakukan atas dasar karena banyak juga yang melakukan. Mereka cenderung mengikuti apa yang dilakukan mayoritas orang tanpa berpikir panjang, dan telak membenarkan tindakan tersebut. Putri, salah seorang informan menuturkan bahwa:

“...Menurut saya itu sih mereka cuma ikut-ikutan mbak, kalau itu sih perkara eksistensi sosial aja sih mbak. Ngikuti sosialnya aja biar tetap dianggap...”
“...Pembenaran menurut pemikiran mereka sendiri itu faktor utama menurut saya sih mbak. Ini juga berkaitan tentang pendidikan masing-masing individu, jadi mereka masyarakat punya kriteria benar menurut pandangan mereka. Padahal seharusnya korban pelecehan seksual harus

didampingi dan dikuatkan tidak malah disalahkan...” (Data primer: Minggu, 19 Mei 2019)

Putri menuturkan bahwa apa yang dilakukan masyarakat hanya untuk kepentingan eksistensi sosial saja. Mereka merasa perlu dianggap dan dihargai dalam kelompok masyarakat dan cara yang tepat salah satunya adalah menyetujui apa yang mayoritas orang lakukan dalam kelompok masyarakat. Hal ini dilakukan agar keberadaan seseorang diakui, dianggap sama dan normal, serta demi menjaga keamanan diri mereka sendiri. Mereka tidak mau tahu dan menjauhi diri dari kejadian yang tidak menguntungkan bagi korban. Hal ini dilakukan masyarakat dengan cara memberi stigma dan menuding korban, serta beranggapan bahwa korban pelecehan seksual terkesan lebih rendah dan tidak setara dengan mereka. Dengan begitu masyarakat berpikiran akan terhindar dari pelecehan seksual.

Senada dengan Putri, Niki juga menuturkan bahwa:

“...Kalau dilingkungan masyarakat rata-rata ikut opini masyarakat gitu, kalau masyarakat biasanya pendapatnya apa gitu otomatis kita yang orang-orang sini itu apalagi ibu-ibu biasanya ikut berpikiran seperti itu, berpendapat seperti itu.

“...Kurangnya edukasi masyarakat tentang seks dan pelecehan seksual itu ya mbak, jadi mereka itu nggak paham kalau mereka berbuat seperti itu dampaknya ke korban itu bagaimana...” (Data primer: Jum’at, 17 Mei 2019)

Niki menuturkan bahwa orang-orang melakukan *victim blaming* karena mengikuti opini masyarakat. Senada dengan Niki, yang menuturkan salah satu faktor trend *taken for granted* yang dilakukan masyarakat yang serentak ikut menyalahkan korban pelecehan seksual adalah kurangnya edukasi masyarakat tentang seks atau *sex education*. Putri juga menuturkan hal yang sama bahwa faktor lain dari apa yang dilakukan masyarakat karena adanya pembenaran menurut pemikiran masyarakat itu sendiri serta berkaitan tentang pendidikan masing-masing individu, menurut putri sebenarnya masyarakat punya kriteria benar menurut pandangan mereka masing-masing, kesadaran diri dari masyarakat yang harus bisa mengarahkan dan menontrol pola pikir serta tingkah laku.

Senada dengan Putri dan Niki beberapa informan lain juga menuturkan hal yang sama mengenai kecenderungan dan pendirian seseorang dalam melakukan tindakan *victim blaming*. Wijayati, menuturkan bahwa media sebagai faktor pendukung masyarakat melakukan *victim blaming* selain dari mengikuti opini masyarakat lain.

“...Masyarakat itu kompak mbak, satu melakukan lainnya pasti ikut-ikut. Apalagi sudah terpengaruh media ya, apa yang ada di media ikut dilakukan di dunia nyata...” (Data primer: Selasa, 14 Mei 2019)

Senada dengan Wijayati, Supiati juga menuturkan bahwa HP sebagai salah satu media perantara yang membuat orang-orang melakukan *victim blaming*.

“...Menurut saya sih mereka itu ya ikut-ikutan aja, apalagi kan sekarang semua sudah bisa pake hp itu ya mbak apa-apa tersebar lewat hp semua jadi tahu. Masyarakat jadi ya terprovokasi mbak. Kalau nyalahin sendiri sih kayaknya ga berani ya mbak...”
(Data primer: Minggu, 12 Mei 2019)

Pembahasan

Kasus pelecehan seksual di Indonesia semakin marak terjadi dan kurang mendapatkan perhatian dan cenderung dianggap normal oleh masyarakat (normalisasi). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maraknya pelecehan seksual terjadi karena tidak adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan atas kasus pelecehan seksual, faktor lain adalah berkembangnya ideologi *victim blaming* (menyalahkan korban). Minimnya kesadaran masyarakat tentang pelecehan seksual dan dampaknya terhadap korban menyebabkan ideologi *victim blaming* ini menjamur dalam masyarakat. Adanya *victim blaming* menyebabkan pelaku pelecehan seksual masih bebas berkeliaran tanpa adanya rasa bersalah dalam dirinya karena merasa didukung oleh orang-orang yang melakukan *victim blaming* kepada korban yang mengakibatkan korban pelecehan seksual tidak mendapatkan keadilan dan haknya sebagai korban.

Victim blaming merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari penormalisasian pelecehan seksual yang dilakukan oleh masyarakat. *Victim blaming* adalah cerminan pencemaran peradaban manusia, dimana letak sisi kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri sudah tidak ada lagi. *Victim blaming* tak hanya bersifat menyalahkan korban tindak pelecehan seksual sebagai sumber masalah, namun juga bisa mengubah pola pikir dan opini khalayak pada umumnya untuk ikut serta melakukan hal tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan asumsi-asumsi teori kelompok bungkam (Muted Group Theory) sebagaimana yang dikutip oleh Edwin dan Stinley Ardener, kelompok bungkam (Muted Group Theory) itu sendiri merupakan teori Antropologi Sosial yang diterapkan dalam melihat dominasi dalam sebuah kelompok sosial. Teori ini berangkat dari sebuah asumsi bahwa kurangnya perhatian terhadap pengalaman perempuan adalah sebuah masalah gender. Kebungkaman kelompok yang kurang kekuasaan menimpa kelompok-kelompok yang menempati tempat yang paling akhir dari tingkatan masyarakat seperti halnya perempuan yang tidak dianggap lebih dominan pari pada laki-laki.

Perempuan yang mengalami pelecehan seksual tidak memiliki kata apapun untuk mendeskripsikan pengalaman

mereka, para perempuan ini telah dibungkam oleh masyarakat melalui sikap masyarakat terhadap para perempuan korban pelecehan seksual. Kurangnya rasa simpati dan empati terhadap sesama perempuan, dikarenakan masyarakat tidak memiliki kepekaan sosial serta minimnya rasa tanggung jawab sehingga cenderung tidak menghiraukan konsekuensi yang diakibatkan dari sikap mereka. Respon masyarakat yang tidak positif ini, membuat banyak korban dan masyarakat diam walaupun mengetahui atau mengalami sebuah kasus pelecehan seksual.

Sikap tak acuh masyarakat terhadap korban, perilaku masyarakat Dolly memang sedikit berbeda dengan masyarakat pada umumnya, bahkan perempuan Dolly pun terlihat lebih bebas dalam menjalankan kehidupan mereka seperti dalam hal berpakaian, bergaul maupun sikap dan tingkah laku. Mereka sering mendengarkan pembicaraan yang cenderung melecehkan atau merendahkan perempuan (PSK), sudah menjadi makanan sehari-hari bagi masyarakat yang ada di Dolly dan pada akhirnya berubah menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakat hingga sekarang. Hal tersebut yang membuat mereka memilih bertahan dalam kondisi apapun. Lapang dada dan bersikap tak acuh atas tindakan-tindakan para pelaku pelecehan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas sikap masyarakat terhadap peristiwa pelecehan seksual jika dikaitkan dengan teori dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menormalisasi peristiwa pelecehan seksual dengan asumsi dari teori kelompok bungkam (Muted Group Theory) oleh Edwin. Berkaca dari teori kelompok bungkam yang menjelaskan bahwa pria adalah kelompok yang dominan dan pengalaman mereka lebih dipilih dibandingkan pengalaman perempuan. Di mana perempuan dianggap lemah dan tidak lebih dominan dibandingkan oleh kaum pria yang merupakan kelompok yang dominan di masyarakat, sistem persepsi mereka yang juga dominan. Dominasi ini menghalangi kebebasan ekspresi perempuan, yang mengakibatkan terjadi normalisasi oleh masyarakat karena tidak adanya perlawanan dan pengakuan dari pihak yang bersangkutan.

Masyarakat Ex-Lokalisasi mempunyai keunikan tersendiri, mereka sangat menjaga kekompakan dalam hidup bermasyarakat tidak terkecuali kekompakan dalam membangun pola pikir dan prinsip hidup mereka. Dengan kata lain mereka hidup mengikuti perkembangan lingkungan dan cenderung tidak memiliki prinsip hidupnya sendiri. Semua bergantung dengan tindakan dan pemikiran orang lain. Salah satu contohnya adalah dalam menyikapi peristiwa pelecehan seksual. Mereka akan bereaksi sama dengan yang mayoritas orang lakukan dalam menyikapi peristiwa pelecehan seksual di Dolly.

Masyarakat Dolly banyak yang melakukan tindakan *victim blaming* terhadap korban pelecehan seksual dengan atau tanpa mereka sadari. 'Banyak' yang berarti hampir seluruh masyarakat kompak melakukan hal tersebut. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang menuturkan bahwa hal tersebut dilakukan atas dasar karena banyak juga yang melakukan. Mereka cenderung mengikuti apa yang dilakukan mayoritas orang tanpa berpikir panjang, dan telak membenarkan tindakan tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Simpulan dalam penelitian mengenai ideologi *victim blaming* pelecehan seksual dapat dilihat dari beberapa macam sub-detail yang akan dirangkum dalam beberapa indikator fokus yang lebih sederhana sebagai berikut, sikap masyarakat terhadap korban pelecehan seksual, sikap masyarakat terhadap peristiwa pelecehan seksual, kecenderungan dan pendirian masyarakat mengenai *victim blaming*.

Sikap masyarakat Ex-Lokalisasi Dolly terhadap korban pelecehan seksual disebabkan karena tidak memiliki kesadaran dan edukasi yang cukup tentang pelecehan seksual. Perempuan yang tinggal di sekitar Ex-Lokalisasi Dolly cenderung bersikap negatif dan melakukan *victim blaming* terhadap korban pelecehan seksual seperti kurangnya rasa simpati dan empati, bersikap tak acuh, menganggap rendah korban pelecehan seksual, dan menyalahkan korban pelecehan seksual. Sikap masyarakat terhadap peristiwa pelecehan seksual, sebagian besar masyarakat Ex-Lokalisasi Dolly memiliki sifat *permissive* atau tak acuh terhadap lingkungan sekitar mereka, masyarakat cenderung menormalisasi peristiwa pelecehan seksual yang terjadi karena mereka menganggap hal tersebut lumrah terjadi.

Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan diharapkan agar masyarakat khususnya perempuan sekitar Ex-Lokalisasi Dolly dapat merubah cara pandang dan pola pikir mereka terhadap para korban kekerasan dan pelecehan seksual. *Victim blaming* dan normalisasi pelecehan seksual adalah masalah yang sudah mengakar dalam masyarakat. Untuk melawannya, masyarakat Ex-Lokalisasi Dolly maupun masyarakat Indonesia harus selalu mendukung para korban, tidak hanya ketika suatu kasus pelecehan menimbulkan reaksi publik melainkan setiap saat. Sebagai masyarakat juga perlu mengubah cara pandang dan pola pikir terhadap pelecehan seksual yang dapat dimulai dengan menghargai jenis pakaian apapun yang para korban kenakan dan tidak menyalahkan secara sepihak. Mengubah cara pandang penting sekali

dalam melihat upaya pencegahan pelecehan seksual dan membantu korban pelecehan seksual untuk bisa bangkit seperti sedia kala.

Kemudian bagi pemerintah, khususnya pemerintah setempat Ex-Lokalisasi Dolly hendaknya mampu mengambil sikap yang tegas terhadap kasus pelecehan seksual agar tidak terulang dikemudian hari, diharapkan pemerintah mampu menangani dan menanggulangi pelecehan seksual yang terjadi. Pemerintah juga diharapkan dapat mengedukasi masyarakatnya tentang seksual dan pelecehan seksual seperti menggelar seminar *sex education* bagi masyarakat sekitar dan melakukan sosialisasi atau menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tertentu untuk membantu masyarakat mendapatkan kebebasan dan keadilan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Byerly, Carolyn. M, Karen Ross. 2006. *Women and Media: a Critical Introduction*. Australia; Blackwell Publishing
- CATAHU KOMNAS Perlindungan Anak dan Perempuan 2018.
- Krolokke, Charlotte, Ann Scott Soresen. 2006. *Gender Communication Theories & Analyses: From Silent to Performance*. Thousand Oaks: Sage
- Meoleong, Lexy J. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sakina, A. I., & Siti, D. H. (2007). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Share Social Work Vol. 7 No. 1*, 1-29.
- Spanier, Graham B. 1979. *Human Sexuality in a Changing Society*. Pennsylvania: Burgess Publishing.
- Thacker, Lily K. 2017. Rape Culture, Victim Blaming, and The Role of Media in The Criminal Justice System. *Kentucky Journal of Undergraduate Scholarship Vol.1 ISS. I, Art. 8*.
- The Canadian Resource Centre for Victims of Crime. 2009. *Victim Baming*.
- Winarsunu, T. 2008. *Psikologi Keselamatan Kerja*. Malang. UMM Press.